



# RENJA

## TAHUN 2024



## RENCANA KINERJA

### SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohiim,

Assalamua'alaikum Warrahmatullah Wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas perkenanNya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2010, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi perencanaan daerah. Keberadaan Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* administrasi perencanaan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang terarah, akurat dan terpadu, sehingga dapat menjamin kesinambungan administrasi di daerah.

Dalam rangka memenuhi tugas pokok tersebut, serta sebagai upaya menciptakan konsistensi antara administrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagai langkah awal penyusunan administrasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Demikianlah Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 di susun dan disampaikan, semoga dapat di jadikan bahan acuan untuk menyusun administrasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Manna,                      Maret 2023  
An. BUPATI BENGKULU SELATAN  
SEKRETARIAT DAERAH

**SUKARNI, SP. M.Si.**  
NIP. 19690926 199403 1 003

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                     | <b>I</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                         | <b>ii</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>                                                                                       |           |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                        | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                                        | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                     | 4         |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                                 | 5         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU<br/>DAN PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH</b> |           |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat<br>Daerah.....               | 7         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....                                                         | 8         |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sekretariat<br>Daerah.....                                    | 11        |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....                                                                   | 12        |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....                                                                | 13        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                           |           |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                                  | 14        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....                                                           | 15        |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....                                                                                  | 17        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                   |           |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                           |           |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR                   TAHUN 2023  
TENTANG   PENETAPAN   RENCANA  
KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DARAH  
KABUPATEN   BENGKULU   SELATAN  
TAHUN 2024

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DARAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

## **BAB I**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dan semangat Otonomi Daerah, menghancurkan Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian kewenangannya Kepala Daerah dalam rangka desentralisasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Untuk dapat tercapainya kewajiban tersebut perlu adanya suatu perencanaan yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Perencanaan kerja sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta

evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Sekretariat Daerah sebagai *leading sector* pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelaksanaan penyusunan administrasi pembangunan di Kabupten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Dalam Hal Ini Bagian Umum) Tahun Anggaran 2024 ini memberi gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Tahun 2024, yang mana di dalam penyusunan Renja ini akan diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan program administrasi pembangunan daerah dengan program perencanaan tingkat nasional maupun provinsi. Hal Ini Sebagaimana di Tegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengawasan Administrasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan administrasi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 disusun Dengan Maksud Untuk Menggambarkan Kondisi Pelaksanaan Administrasi pembangunan yang ingin dicapai dilingkungan Sekretariat Daerah dan Kondisi yang diinginkan satu tahun ke depan dalam Rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah visi dan misi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitanya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah untuk merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan

kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan kepentingan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung Pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan dan pengawasan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah Bengkulu Selatan.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di Sekretariat Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024.
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA-OPD) sehingga dalam penyusunan administrasi perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN RESTRASIA SEKRETARIAT DAERAH**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan disusun mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan dokumen administrasi perencanaan dimana didalamnya memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategis yang akan dilaksanakan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah kabupaten Bengkulu Selatan memiliki fungsi sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan Program pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah. Untuk itu setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus mampu mengakomodasi dan mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan strategi pemerintah daerah terutama yang terkait dengan urusan perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan. Program dan kegiatan beserta kebutuhan Pendanaan indikatif perlu di rumuskan dengan berdasarkan pada kondisi, Potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi yang tumbuh Berkembang di Sekretariat Daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama satu tahun kedepan dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*treatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi Perkembangan masa depan yang di inginkan dan dapat di capai dengan Mengacu pada dokumen RPJMD.

Demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pelaksanaannya dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, perincian realisasi anggaran dana kegiatan pada tahun anggaran 2021 dapat dicermati pada tabel 2.1 berikut :

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Capaian kinerja sekretariat daerah kabupaten Bengkulu selatan sampai dengan Tahun 2023 di tunjukan melalui jumlah perencanaan dan pengawasan administrasi yang melibatkan partisipasi bagian-bagian. Dokumen perencanaan dan Pengawasan administrasi perlu penelitian pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir, beberapa indikator peningkat tersebut antara lain:

1. Meningkatnya partisipasi bagian bagian dalam proses perencanaan dan Pengawasan administrasi pembangunan. Hal ini dapat di lihat pad usulan kegiatan di setiap bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan;
2. Meningkatnya keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi;
3. Meningkatnya efektifitas produk produk pengembangan dan penelitian Berupa hasil kajian.

Dalam peningkatan kualitas proses perencanaan dan pengawasan administrasi tersebut belum di ikuti oleh peningkatan kualitas produk pengawasan administrasi. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah antara lain;

1. Munculnya berbagai kebijakan dan kebijakan dengan para pemangku kepentingan pelaksanaan administrasi pembangunan di daerah yang Berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan di daerah;
2. Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan-undangan yang mengatur sistem perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan dan pengawasan administrasi pembangun daerah;

3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan yang berkompeten;
4. Perubahan pradigma perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan yang menuntut pengawasan sebagai fasilitator dan mediator mengakomodir aspirasi;
5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan dan pengawasan administrasi pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan selanjutnya;
6. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pelaksanaan perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan di daerah;
7. Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan gelar maupun non gelar;
8. Adanya peningkatan peran dan partisipasi pegawai dalam perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan;
9. Adanya ketersediaan dan kesanggupan perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk terlihat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah;
10. Pengembangan wilayah yang pesat akibat pengaruh pelaksanaan pembangunan.

Secara detail, analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dicermati pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**

| No | Indikator                                                | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Taget dan Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 |           | Taget dan Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2018 |           | Taget dan Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 |           | Taget dan Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 |           | Taget dan Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2021 |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|    |                                                          | 2016                                    | target                                                   | realisasi | target                                                   | Realisasi | Target                                                   | Realisasi | Target                                                   | realisasi | target                                                   | realisasi | 2022                                     |
| 1  | Produk Hukum Daerah                                      | 514                                     | 500                                                      | 709       | 500                                                      | 514       | 500                                                      | 569       | 500                                                      | 475       | 500                                                      | 500       | 425 (Januari-Juli)                       |
| 2  | Skor IKK LPPD                                            | 3.0533                                  | 3,1200                                                   | 3.0533    | 3,1200                                                   | 3.0533    | 3,1200                                                   | 3.0919    | 3,1200                                                   | 3.079     | 3,1200                                                   | 3.5       | 3500                                     |
| 3  | Jumlah Regulasi Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 514                                     | 500                                                      | 709       | 500                                                      | 514       | 500                                                      | 569       | 500                                                      | 475       | 500                                                      | 500       | 425 (Januari-Juli)                       |
| 4  | Jumlah Paket Pengadaan uang dilakukan melalui ULP        | 66                                      | 84                                                       | 71        | 84                                                       | 66        | 84                                                       | 67        | 84                                                       | 62        | 84                                                       | 100       | 116                                      |
| 5  | Laju Inflasi Daerah                                      | 2.35%                                   | 3±1                                                      | 3.56%     | 3±1                                                      | 2.35%     | 3±1                                                      | 3.09%     | 3±1                                                      | 1.31%     | 3±1                                                      | 2.42      | Akhir Tahun ( )                          |
| 6  | Persentase Rencana Kebijakan Pembangunan                 | 70                                      | 100                                                      | 65        | 100                                                      | 70        | 100                                                      | 75        | 100                                                      | 80        | 100                                                      | 80        | 85                                       |
| 7  | Nilai Evaluasi Sakip                                     | C                                       | BB>60                                                    | C=48,53   | BB>60                                                    | C=47,23   | BB>60                                                    | CC=57,95  | BB>60                                                    | CC=58,38  | BB>60                                                    | CC=58,38  | CC=58,93                                 |
| 8  | Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik                | 77.25                                   | 79.25                                                    | 76.61     | 79.25                                                    | 79.25     | 79.25                                                    | 79.25     | 79.25                                                    | -         | 79.25                                                    | 72,21     | 72,21                                    |
| 9  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                         | 76.35                                   | 79.35                                                    | 71.96     | 79.35                                                    | 79.25     | 79.35                                                    | 80        | 79.35                                                    | 81.16     | 79.35                                                    | 80        | 86,16                                    |
|    |                                                          |                                         |                                                          |           |                                                          |           |                                                          |           |                                                          |           |                                                          |           |                                          |

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 9 tahun 2016 mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah. Sekretariat Daerah sebagai leading sektor pengawasan administrasi pembangunan di Sekretariat Daerah memiliki tugas dan Fungsi pelayanan dan penyediaan rencana yang terarah, akurat dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pengawasan di daerah.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsekuensi antara penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Sekretariat Daerah sebagai lembaga pengawasan di daerah harus terus di pacu dan ditingkatkan. Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat di tarik beberapa isu setrategis yang menjadi tantangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah
2. Belum optimalnya pelayanan public sesuai standar pelayanan minimal
3. Masih rendahnya etika ajaran pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih (bebas KKN)
4. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
5. Masih perlunya pembenahan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit
6. Masih perlunya akselerasi peningkatan kualitas pelayanan public
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penjadi penghambat dan permasalahan pelaksanaan pengawasan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

1. Belum memadai tenaga administrasi perencanaan.
2. Belum tersedia data administrasi yang akurat dan lengkap.

3. Belum di pedomaninya dokumen perencanaan administrasi.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pengawasan administrasi
5. Kurangnya dokumen teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan di susun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang Selaras dengan setrategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD, setrategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pengawasan komprehensif tentang bagaimana sekretariat daerah mencapaitujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Sekretariat Daerah**

Rencana kerja (renja) Sekretariat Daerah untuk satu tahun setelah tahun rencana (n+1). Sehingga dapat di bandingkan indikator program dan kinerja pada tahun di rencanakan akan mengalami peningkatan atau tidak.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, kedudukan RKPD menjadi penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran atau plafon anggaran.

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 serta pencapaian kinerja Restra Sekretariat Daerah ditujukan guna mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatnnya serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja beserta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review tersebut dapat dicermati pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

| No                                                               | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan           | Rencana Awal       |                                                                                                                                |                   |                     | Rencana Awal       |                                                                                                                                |                   |                     | Catatan<br>Penting |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                  |                                                                        | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                                                              | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi             | Indikator Kinerja                                                                                                              | Target<br>Capaian | Pagu Indikatif (RP) |                    |
|                                                                  | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                    |                    |                                                                                                                                |                   |                     |                    |                                                                                                                                |                   |                     |                    |
|                                                                  | SEKRETARIAT DAERAH                                                     |                    |                                                                                                                                |                   | 42,685,734,831      |                    |                                                                                                                                |                   | 42,685,734,831      |                    |
|                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                    |                                                                                                                                |                   | 34,654,323,651      |                    |                                                                                                                                |                   | 34,654,323,651      |                    |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                        |                    |                                                                                                                                |                   |                     |                    |                                                                                                                                |                   |                     |                    |
| 01                                                               | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                  | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                 | 10 Dokumen        | 72,274,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                 | 10 Dokumen        | 72,274,000          |                    |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                        |                    |                                                                                                                                |                   | 14,170,000,000      |                    |                                                                                                                                |                   | 14,170,000,000      |                    |
| 01                                                               | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                   | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 145 Orang/bu      | 12,350,000,000      | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | 145 Orang/bu      | 12,350,000,000      |                    |
| 02                                                               | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                       | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 8 Dokumen         | 2,100,000,000       | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                       | 8 Dokumen         | 2,100,000,000       |                    |
| 03                                                               | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                   | 21 Dokumen        | 125,000,000         | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                   | 21 Dokumen        | 125,000,000         |                    |
| 04                                                               | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD      | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan         | 50,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD | 4 Laporan         | 50,000,000          |                    |
| 05                                                               | Pengelolaan dan Penyiapan<br>Bahan Tanggapan<br>Pemeriksaan            | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                 | 1 Dokumen         | 75,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan<br>Tanggapan Pemeriksaan dan<br>Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                 | 1 Dokumen         | 75,000,000          |                    |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                        |                    |                                                                                                                                |                   | 132,123,517         |                    |                                                                                                                                |                   | 132,123,517         |                    |
| 01                                                               | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                         | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                               | 4 Dokumen         | 132,123,517         | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                               | 4 Dokumen         | 132,123,517         |                    |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                        |                    |                                                                                                                                |                   | 160,979,996         |                    |                                                                                                                                |                   | 160,979,996         |                    |
| 02                                                               | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian             | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian                                             | 2 Dokumen         | 75,979,996          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Sistem Informasi Kepegawaian                                             | 2 Dokumen         | 75,979,996          |                    |

|                                                                         |                                                                   |                    |                                                                                         |              |                      |                    |                                                                                         |              |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 04                                                                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 2 Dokumen    | 85,000,000           | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 2 Dokumen    | 85,000,000           |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                   |                    |                                                                                         |              | <b>5,800,000,000</b> |                    |                                                                                         |              | <b>5,800,000,000</b> |  |
| 01                                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 4 Paket      | 250,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 4 Paket      | 250,000,000          |  |
| 04                                                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 9 Paket      | 700,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                      | 9 Paket      | 700,000,000          |  |
| 05                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket      | 250,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 1 Paket      | 250,000,000          |  |
| 06                                                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen    | 500,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 1 Dokumen    | 500,000,000          |  |
| 07                                                                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 1 Laporan    | 1,650,000,000        | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 1 Laporan    | 1,650,000,000        |  |
| 08                                                                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 1 Laporan    | 2,450,000,000        | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 1 Laporan    | 2,450,000,000        |  |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                   |                    |                                                                                         |              | <b>2,650,000,000</b> |                    |                                                                                         |              | <b>2,650,000,000</b> |  |
| 01                                                                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sekretariat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 9 Unit       | 700,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan     | 9 Unit       | 700,000,000          |  |
| 02                                                                      | Pengadaan Mebel                                                   | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 10 Unit      | 500,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                      | 10 Unit      | 500,000,000          |  |
| 03                                                                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Sekretariat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 10 Unit      | 1,450,000,000        | Sekretariat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 10 Unit      | 1,450,000,000        |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                   |                    |                                                                                         |              | <b>4,012,263,228</b> |                    |                                                                                         |              | <b>4,012,263,228</b> |  |
| 01                                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 4500 Laporan | 70,000,000           | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 4500 Laporan | 70,000,000           |  |

|                                                                                    |                                                                                                                     |                    |                                                                                                          |              |                      |                    |                                                                                                          |              |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 02                                                                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 4 Laporan    | 3,002,263,228        | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 4 Laporan    | 3,002,263,228        |  |
| 03                                                                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Laporan    | 700,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Laporan    | 700,000,000          |  |
| 04                                                                                 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan    | 240,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan    | 240,000,000          |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>       |                                                                                                                     |                    |                                                                                                          |              | <b>3,000,000,000</b> |                    |                                                                                                          |              | <b>3,000,000,000</b> |  |
| 01                                                                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sekretariat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 30 Unit      | 2,000,000,000        | Sekretariat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 30 Unit      | 2,000,000,000        |  |
| 02                                                                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Sekretariat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 10 Unit      | 300,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 10 Unit      | 300,000,000          |  |
| 03                                                                                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Sekretariat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 5 Unit       | 700,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 5 Unit       | 700,000,000          |  |
| <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> |                                                                                                                     |                    |                                                                                                          |              | <b>971,490,504</b>   |                    |                                                                                                          |              | <b>971,490,504</b>   |  |
| 01                                                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 1 Orang/Bula | 187,343,004          | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 1 Orang/Bula | 187,343,004          |  |
| 02                                                                                 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 34 Paket     | 175,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 34 Paket     | 175,000,000          |  |
| 03                                                                                 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 1 Orang      | 109,147,500          | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 1 Orang      | 109,147,500          |  |

|                                                      |                                                                             |                    |                                                                                             |              |                      |                    |                                                                                             |              |                      |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--|
| 04                                                   | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bula | 500,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 Orang/Bula | 500,000,000          |  |
| <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b> |                                                                             |                    |                                                                                             |              | <b>2,182,824,281</b> |                    |                                                                                             |              | <b>2,182,824,281</b> |  |
| 01                                                   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 1 Paket      | 1,115,931,206        | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 1 Paket      | 1,115,931,206        |  |
| 02                                                   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | 1 Paket      | 816,893,075          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                     | 1 Paket      | 816,893,075          |  |
| 03                                                   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 1 Paket      | 250,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 1 Paket      | 250,000,000          |  |
| <b>Penataan Organisasi</b>                           |                                                                             |                    |                                                                                             |              | <b>972,368,125</b>   |                    |                                                                                             |              | <b>972,368,125</b>   |  |
| 01                                                   | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                 | 5 Dokumen    | 310,787,500          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                 | 5 Dokumen    | 310,787,500          |  |
| 02                                                   | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                           | 5 Laporan    | 357,405,625          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                           | 5 Laporan    | 357,405,625          |  |
| 03                                                   | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                 | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                  | 2 Dokumen    | 304,175,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                  | 2 Dokumen    | 304,175,000          |  |
| <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> |                                                                             |                    |                                                                                             |              | <b>3,328,695,780</b> |                    |                                                                                             |              | <b>3,328,695,780</b> |  |
| <b>Administrasi Tata</b>                             |                                                                             |                    |                                                                                             |              | <b>763,121,580</b>   |                    |                                                                                             |              | <b>763,121,580</b>   |  |
| 01                                                   | Penataan Administrasi Pemerintahan                                          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                     | 2 Dokumen    | 197,081,080          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                     | 2 Dokumen    | 197,081,080          |  |
| 02                                                   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                        | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                   | 2 Dokumen    | 394,400,100          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                   | 2 Dokumen    | 394,400,100          |  |
| 03                                                   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                       | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | 2 Dokumen    | 171,640,400          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                  | 2 Dokumen    | 171,640,400          |  |
| <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>    |                                                                             |                    |                                                                                             |              | <b>1,400,000,000</b> |                    |                                                                                             |              | <b>1,400,000,000</b> |  |
| 01                                                   | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                           | 2 Dokumen    | 550,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                           | 2 Dokumen    | 550,000,000          |  |

|                                             |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| 02                                          | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen | 300,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 2 Dokumen | 300,000,000          |  |
| 03                                          | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 2 Dokumen | 550,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 2 Dokumen | 550,000,000          |  |
| <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>      |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>1,050,000,000</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>1,050,000,000</b> |  |
| 01                                          | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen | 360,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen | 360,000,000          |  |
| 02                                          | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Sekretariat Daerah | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Kasus  | 390,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Kasus  | 390,000,000          |  |
| 03                                          | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen | 300,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen | 300,000,000          |  |
| <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>         |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>115,574,200</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>115,574,200</b>   |  |
| 01                                          | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen | 115,574,200          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen | 115,574,200          |  |
| <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b> |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>2,782,715,400</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>2,782,715,400</b> |  |
| <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   |                                                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>400,000,000</b>   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>400,000,000</b>   |  |
| 01                                          | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen | 200,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen | 200,000,000          |  |

|                                                                    |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             |                      |                    |                                                                                                                                                                                  |             |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 02                                                                 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                    | 2 Laporan   | 200,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                    | 2 Laporan   | 200,000,000          |  |
| <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                        |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,138,695,000</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,138,695,000</b> |  |
| 01                                                                 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                         | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                            | 3 Dokumen   | 389,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                            | 3 Dokumen   | 389,000,000          |  |
| 02                                                                 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                     | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                               | 4 Laporan   | 257,620,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                               | 4 Laporan   | 257,620,000          |  |
| 03                                                                 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                        | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                  | 4 Laporan   | 492,075,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                  | 4 Laporan   | 492,075,000          |  |
| <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                       |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,044,020,400</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,044,020,400</b> |  |
| 01                                                                 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                       | 200 Dokumen | 598,696,400          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                       | 200 Dokumen | 598,696,400          |  |
| 02                                                                 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                   | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                         | 2 Dokumen   | 250,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                         | 2 Dokumen   | 250,000,000          |  |
| 03                                                                 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                     | 18 Orang    | 195,324,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                     | 18 Orang    | 195,324,000          |  |
| <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                       |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>200,000,000</b>   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>200,000,000</b>   |  |
| 02                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen   | 200,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen   | 200,000,000          |  |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,920,000,000</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,920,000,000</b> |  |
| <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,920,000,000</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |             | <b>1,920,000,000</b> |  |
| 01                                                                 | Fasilitasi Keprotokolan                                                           | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                     | 200 Laporan | 550,000,000          | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                     | 200 Laporan | 550,000,000          |  |
| 02                                                                 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                    | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                              | 24 Laporan  | 1,050,000,000        | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                              | 24 Laporan  | 1,050,000,000        |  |

|               |                                    |                    |                                                      |             |                       |                    |                                                      |             |                       |  |
|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--|
| 03            | Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan | 200 Laporan | 320,000,000           | Sekretariat Daerah | Jumlah Laporan<br>Pendokumentasian Tugas<br>Pimpinan | 200 Laporan | 320,000,000           |  |
| <b>JUMLAH</b> |                                    |                    |                                                      |             | <b>42,685,734,831</b> |                    |                                                      |             | <b>42,685,734,831</b> |  |

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang tarangkum dalam Renja Sekretariat Daerah semaksimal mungkin dapat mengakomodir kebutuhan setiap lapisan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pengawasan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Mekanisme pengajuan usulan program dan kegiatan dapat langsung di tunjukan kepada Bupati Bengkulu selatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari Sekretaris Daerah melalui bagian bagian di sekretariat daerah yang di lakukan penelitian di lapangan dan pengamatan pelaksanaan yang telah di laksanakan tahun sebelumnya.

Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut di kelompokkan dan di kaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai leding sector koordinasi perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**

| <b>STRATEGI</b> |                                                                                                     | <b>ARAH KEBIJAKAN</b> |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesional SDM khususnya di bidang perencanaan       | -                     | Penguatan sumber daya tenaga perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah                                                                                      |
| 2.              | Peningkatan ketersediaan data administrasi pembangunan yang sistematis, akurat dan akuntabel        | -                     | Penguatan data dan informasi perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah                                                                                      |
| 3.              | Meningkatkan peran monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi hasil administrasi pembangunan daerah | -                     | Peningkatan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah<br>Peningkatan penerapan pengawasan dan penganggaran yang berbasis kinerja |

|    |                                                            |   |                                                                |
|----|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| 4. | Peningkatan koordinasi, integritas dan sinkronisasi        | - | Peningkatan kemitraan dan tenaga-tenaga administrasi eksternal |
| 5. | Meningkatkan ketersediaan dukunganteknologi informasi (TI) | - | Peningkatan aksesibilitas teknologi informas                   |

### 3.2 Tujuan, Sasaran dan Renja Sekretariat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Visi Sekretariat Daerah berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran dalam pengawasan pemerintah serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan dimasa depan, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu selatan yaitu :

***“Menjadi Institusi Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Daerah Yang Strategis Untuk Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sehat dan Bertaqwa Menuju Bengkulu Selatan EMAS”***

Misi Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan demi tercapainya akselerasi pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan, maka dirumuskan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang penyusunan administrasi perencanaan pengawasan untuk memaksimalkan pengkajian dan pengembangan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi yang lebih berkualitas dalam proses pengawasan administrasi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan atar fungsi pemerintahan

daerah, maupun antar pusat dan daerah, serta antar pengendali, pelaksanaan dan pengawasan administrasi.

3. Meningkatkan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan yang komprehensif terhadap pelaksanaan rencana penyusunan administrasi pembangunan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan administrasi pembangunan daerah dengan rencana pemanfaatan ruang dan kajian lingkungan hidup strategis.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

| <b>Tujuan</b>                                                             | <b>Indikator Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>                                                              | <b>Indikator Kinerja</b>                                                                                                              | <b>Target Kinerja Tahun 2022</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Indek Reformasi Birokrasi | 1. Terlaksananya kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. | - Nilai LPPD<br>- Indeks Kesejahteraan Masyarakat<br>- Keselarasan Fasilitasi Pentaan Peraturan Perundang-undangan                    | 3,500<br><br>80%                 |
|                                                                           |                           | 2. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan           | - Terkendalinya Inflasi Daerah<br>- Indeks Ketersediaan Infrastruktur<br>- Persentase Proses PBJ                                      | 3,00<br>95%<br>100%              |
|                                                                           |                           | 3. Terlaksananya Kebijakan di Bidang Adminiistrasi Umum                     | - Nilai RB<br>- Nilai SAKIP<br>- Nilai AKIP Setda<br>- Opini BPK<br>- Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan, Komunikasi dan Pimpinan | 80%<br>B<br>B<br>Wtp<br>80%      |

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah yaitu :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, dengan Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- j. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- l. Penataan Organisasi
- m. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

**2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**, dengan Kegiatan :

- a. Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d. Fasilitasi Kerjasama Daerah

**3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**, dengan Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pada periode Tahun 2021-2026, visi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah “***Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sehat dan Bertaqwa Manuju Bengkulu Selatan EMAS***”. Dalam rangka mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Sejahtera dan Berdaya Saing
2. Memperkuat Infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berdaya saing.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi (*good governance* dan *clean government*).

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum perlu disandingkan antara visi dan misi Sekretariat Daerah visi misi Kepala Daerah. Dengan memahami visi dan misi ini diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerah. Disisi lain, visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pelaksanaan administrasi pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

Secara garis besar, rumusan Rencana Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana kerja yang disusun Sekretariat Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

Terwujudnya perencanaan dan pengawasan administrasi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komphrehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari pemerintah daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga perencana dan pengawasan administrasi pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Sekretariat Daerah yang professional.
2. Terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan dan pengawasan administrasi daerah.

Rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengawasan administrasi daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah terutama pada akhir periode Renstra di jadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pengawasan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir.

Dalam kaitan tersebut maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2021 meliputi :

1. Setiap elemen dalam lingkup Sekretariat Daerah berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan lebih lanjut

visi, misi, tujuan, sasaran dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

**SUKARNI, SP. M.Si**  
NIP. 19690926 199403 1 003